

PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN LITERASI MITIGASI BENCANA TSUNAMI UNTUK MEMBENTUK CIVIC KNOWLEDGE

Anti Karlina, Wika Hardika Legiani, & Dinar Sugiana Fitrayadi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: antikarlina21@gmail.com wikahardikalegiani@gmail.com & dinar.sugiana@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Perspektif Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Literasi Mitigasi Bencana Tsunami Untuk Membentuk Civic Knowledge di Pesisir Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan Kualitatif dengan metode Deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Wakil Kepala Desa Teluk Kecamatan Labuan, Wakil Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang dan Warga lingkungan sekitar di Desa Teluk Kecamatan Labuan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil yang ditemukan yaitu adanya upaya pengembangan kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami dalam meningkatkan pemahaman masyarakat di lingkungan sekitar Desa Teluk, sebagai upaya pengurangan resiko bencana yang harus dijalankan multi pihak dan untuk membangun kesadaran bersama, yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat sekitar Desa Teluk oleh aparatur Desa Teluk, bersama BPBD Pandeglang, BNPB Pusat serta komunitas dan relawan-relawan lainnya. Peran aparatur Desa Teluk sebagai masyarakat dalam pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami berperan sebagai pelaku atau aktor yang memberikan informasi serta mendiskusikan dan meluruskan perihal pemahaman atau penafsiran jika ada yang kurang sesuai di masyarakat.

Kata Kunci: Literasi Mitigasi, Bencana Tsunami, Pengetahuan Kewarganegaraan

Abstract

The study was intended to describe how people's perspective on the implementation of the bencana tsunami task force to form civic knowledge on the coastal village of the gulf sub-district pandeglang. The research methods used in this study are a qualitative approach with a descriptive method. The study subject is the vice principal labuoluk district dendono, deputy chief of the regional disaster relief agency (BPBD) pandeglang and residents of the surrounding bay area. Data-collecting techniques using interviews, observations, documentation, and library studies. Data analysis USES data reduction, data presentation, deduction drawing. The validity of data is done with technical triangulation and source triangulation. The result has been the development of tsunami mitigation efforts to increase the understanding of communities in the surrounding gulf village, as a disaster relief effort to achieve joint awareness, carried out in communities around the gulf village by the gulf village, along with BPBD pandeglang, the central and community and other volunteers. The role of the gulf village's personnel as people in implementing the tsunami disaster will serve as information actors or actors who discuss and correct matters of understanding or interpretation if anything is misfit in society.

Keywords: Mitigation Literacy, Tsunami, Civic Knowledge

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rawan bencana di dunia. Kejadian berbagai bencana yang melanda di wilayah nusantara ini berlangsung secara terus menerus, baik yang disebabkan oleh faktor alam (gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api,

tanah longsor, angin ribut dan kekeringan), maupun oleh faktor nonalam seperti berbagai akibat kegagalan teknologi dan ulah manusia. Begitu banyak bencana alam terjadi di berbagai wilayah Indonesia dengan jenis bencana bervariasi, bencana alam mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit baik secara langsung maupun tidak

langsung semisal korban jiwa, rusak dan hilangnya harta benda, rusaknya infrastruktur, rusaknya lingkungan hidup, dan trauma bagi korban yang berhasil selamat.

Sebagaimana kita ketahui Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan mengalami bencana yang sangat tinggi dengan berbagai jenis bencana bervariasi termasuk gempa bumi dan tsunami di wilayah Indonesia, yang tentunya berakibat kerugian yang tidak sedikit baik secara langsung maupun tidak langsung. Serta saatnya untuk secara sadar mengajarkan pemahaman tentang apa-apa yang harus dilakukan apabila terjadi fenomena alam tersebut.

Proses terjadinya tsunami yang disebabkan oleh gempa, pergerakan lempeng tektonik, tsunami juga disebabkan oleh beberapa hal lain, misalnya saja karena adanya tanah longsor di dasar laut,

karena jatuhnya benda langit (misalnya meteor) ke dalam laut, maupun akibat runtuhnya kepundan gunung api yang meletus ke laut. Tsunami yang dihasilkan dari runtuhnya kepundan gunung api yang meletus ke laut, yaitu seperti Gunung Anak Krakatau meletus pada 22 Desember 2018.

Masih hangat dalam ingatan kita, pasca bencana tsunami 22 Desember 2018 di hampir seluruh wilayah Pesisir Desa Teluk dan termasuk obyek wisata kawasan Pantai Labuan-Carita sekitarnya mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi terhadap ruang sarana prasarana, yang kemudian pembangunan jika tidak diimbangi dari pembangunan sarana dan prasarana dari kegiatan pemanfaatan tersebut dengan baik, maka akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan di kawasan Pesisir Pantai Desa Teluk Kecamatan Labuan dan sekitarnya

KORBAN BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA YANG MENINGGAL DUNIA DESA TELUK KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG 22 DESEMBER 2018

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Lokasi Kejadian	Alamat
1	Muari	Laki-Laki	70 Tahun	Nelayan/Perikanan	Rumah	Kp. Nelayan II RT.002/012
2	Asmanto	Laki-Laki	38 Tahun	Nelayan/Perikanan	Sungai	Kp. Nelayan II RT.002/012
3	Buang	Laki-Laki	40 Tahun	Nelayan/Perikanan	Laut	KP. Tanjung Sari RT.003/005
4	Tini	Perempuan	45 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Rumah	KP. Pelelangan RT.001/005
5	Najib	Laki-Laki	1,5 Tahun	-	Rumah	KP. Pelelangan RT.001/005
6	Andi Suhandi	Laki-Laki	55 Tahun	Wiraswasta	Rumah	KP. Cipunten Agung RT.001/006

Berdasarkan data di atas yang bersumber dari Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Bahwasannya Tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 menyebabkan jatuhnya

korban yang meninggal dunia sebanyak 6 (enam) orang dengan di dominasi bermata pencaharian nelayan atau perikanan, dan yang bertempat tinggal tepat di bibir pantai

letaknya beresiko terkena dampak tsunami yang sangat tinggi.

Dilansir dalam CNBP Indonesia, oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seputar bencana Tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 yang terjadi pada hari Sabtu. Sampai dengan H+11 bencana, jumlah korban jiwa hingga mencapai 437 orang. Dan dari paparan Sutopo menambahkan kerusakan menimpa 2.752 rumah, 92 penginapan atau warung, dan 510 perahu atau kapal rusak akibat tsunami. Sebanyak 147 kendaraan roda dua dan tempat juga rusak. Serta satu dermaga dan satu shelter yang rusak.

Bukan hanya dari segi ekologi melainkan dari segi sosial dan ekonomi. Dimana kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana tsunami perubahan bentang lingkungan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Keadaan yang berpengaruh terhadap kondisi kelestarian pantai dan lingkungan sekitarnya serta jumlah kunjungan wisatawan. Dengan sebelum terjadinya bencana tsunami, karena daerah ini merupakan daerah perkampungan tradisional bagi masyarakat. Masyarakat yang hampir keseluruhan penduduknya bermata pencaharian sebagai Nelayan dan berjualan kios-kios kecil pesisir pantai. Mengingat daerah ini terletak di bibir pantai, maka kerusakan akibat tsunami sangat fatal. Saat tsunami melanda Desa Teluk, kawasan ini termasuk kawasan yang sangat parah kondisinya diantara daerah pesisir di kecamatan Labuan.

Kenyataan berdasarkan yang telah diulas dimuka, bahwa tsunami merupakan bencana alam yang tidak dapat dihindari namun resiko dari bencana tersebut dapat dikurangi. Dengan kemampuan masing-masing, baik secara individu atau kelompok untuk mengurangi resiko tsunami, semua orang dapat berperan aktif. Pengetahuan yang kurang mendalam tentang bencana tsunami, diantaranya

sebab-sebab, ciri-ciri atau sifat-sifat, maupun tanda-tanda akan terjadinya tsunami, serta yang menyebabkan timbulnya korban dikarenakan kurangnya perencanaan pengembangan kawasan pantai yang tidak tahan gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, diperlukannya pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami guna secara sadar mengajarkan pemahaman tentang apa-apa yang harus dilakukan apabila terjadi fenomena alam tersebut.

Melihat kenyataan itu fenomena alam tsunami di Negara kita tentunya tidak mungkin dapat dihindari. Namun demikian upaya yang masih dapat dilakukan adalah mengurangi berbagai resiko kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan. Oleh karena itu untuk mengurangi dan meredam timbulnya korban jiwa dan kerugian harta benda akibat proses geologi yang tidak akan pernah berhenti tersebut, perlu dilakukannya upaya mitigasi.

Sebagai warga negara, dimana berkaitan dengan nilai apa yang seharusnya diketahui (Civic Knowledge). Menurut Arif & Aulia (2016: 395) (Nurgiansah, 2020) Seorang masyarakat negara yang efektif dalam kehidupan globalisasi pada dasarnya dikehendaki memiliki kompetensi dalam tatanan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang siap memiliki hubungan dan koneksi melintasi perbedaan namun sekaligus menjaga dan memperdalam rasa identitas dan integritas dirinya sebagai bagian dari warga negara suatu negara. Demikian karakter dan kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan yaitu dengan pengetahuan Kewarganegaraan, sehingga tujuan dari cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 tercapai. Dengan menjaga agar hak-hak sebagai warga negara terlindungi, warga negara mempunyai hak atas informasi, hak untuk menyampaikan usulan, dan hak untuk melakukan kritik

terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Bagaimana menciptakan kondisi sosial yang stabil serta mengurus standar keselamatan publik yang baik.

Pendidikan berbasis literasi menjadi cara yang bisa ditempuh sebagai sarana untuk pengembangan kemampuan. Literasi baik sebuah keterampilan maupun praktik sosial, mampu membawa hidup seseorang ke tingkat sosial yang lebih baik. Demikian pada literasi bertujuan untuk mencapai kesadaran, mampu berfikir pada sebuah pemecahan masalah, kritis, kreatif, evaluatif dan juga merupakan ukuran kemajuan sebuah bangsa.

Menurut Suryadi dalam Raharjo (2017: 177) (Nurgiansah, 2021) Peningkatan Civic Literacy, yakni pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik, dan kenegaraan menjadi keniscayaan seiring dengan perubahan politik yang menuntut masyarakat bertindak secara otonom. Menjadi sebuah tuntutan seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi serta arus globalisasi.

Menurut Dewayani & Retnaningdyah (2017: 213) Saat ini kita mengenal sebutan literasi sebagai keselamatan jalan, literasi kewarganegaraan, literasi moral, yang memberikan makna kepada kita cara memahami sesuatu. Misalnya literasi kewarganegaraan bukan sekedar pengetahuan kewarganegaraan atau pendidikan mengenai bagaimana menjadi warga negara yang baik. Literasi kewarganegaraan bermakna lebih luas; yaitu memahami pengetahuan terkait kewarganegaraan, mampu memilah informasi terkait kewarganegaraan dari berbagai sumber, menganalisisnya, lalu menggunakannya untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai warga negara yang baik dan bermartabat. Bukan sekedar fashion untuk pemaknaan literasi sendiri

melainkan menjadi alat untuk memberdayakan manusia dan memampukannya untuk memenuhi tantangan di kemudian hari.

Demikian dari ulasan di atas dalam upaya mewujudkan masyarakat negara yang baik dengan beberapa komponen inti yang ada dalam Civic Literacy, seperti komponen pengetahuan kewarganegaraan (Civic Knowledge), keterampilan kewarganegaraan (Civic Skills), dan karakter atau sikap kewarganegaraan (Civic Disposition) merupakan aspek penting dalam mengembangkan perilaku integratif yang berkontribusi secara positif. Dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik, dan kenegaraan, dengan pemaknaan literasi sendiri melainkan menjadi alat untuk memberdayakan manusia dan memampukannya menjadi sebuah tuntutan arus globalisasi untuk memenuhi tantangan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil prapenelitian yang peneliti lakukan, mengenai literasi mitigasi bencana tsunami sebagaimana fokus peneliti di Desa Teluk Labuan, bahwasanya ditemukan sudah terlaksananya simulasi atau penyuluhan mengenai fenomena alam tsunami, terkait kesiapsiagaan dan waspada terhadap ancaman yang akan dihadapi kepada masyarakat dari BPBD Kabupaten, BPBD Provinsi, dan BNPB Pusat sebelum terjadinya bencana tsunami selat sunda pada 22 Desember 2018. Seperti oleh Pelaksana BNPB Pusat dan BPBD Pandeglang dalam bentuk kegiatan penyuluhan yang ditargetkan untuk masyarakat telah berlangsung terkait prabencana dan pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan di kantor desa teluk. Kemudian juga sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah dalam penyampaiannya terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana tsunami dari situasi kerentanan tinggi dengan daerahnya yang rawan akan bencana tersebut. Namun,

sikap itu harus disertai dengan pemahaman benar oleh masyarakat lokal secara individu atau kelompok, dan pemangku kebijakan yang dapat berperan aktif terkait kesiapsiagaan di kawasan rawan bencana, termasuk pemahaman tentang cara penyelamatan yang benar, dapat ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi bencana dan program gladi lapang selain dengan pemahaman kondisi fisik bentuk pemahaman lingkungan juga. Karena dikhawatirkan dengan pemahaman yang keliru bukan hanya merugikan, tetapi bisa membahayakan diri sendiri.

Bentuk upaya yang dilakukan sebagai usaha literasi mitigasi bencana, dimana merupakan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang bijaksana untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana dan pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana. Mengingat bahwa mitigasi ditujukan untuk mengurangi resiko akibat bencana terhadap korban jiwa, rusak dan hilangnya harta benda, rusaknya infrastruktur, rusaknya lingkungan hidup, dan trauma bagi korban yang berhasil selamat.

Setelah data yang peneliti dapatkan dari prapenelitian ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang bukan hanya terkait sedikit banyaknya edukasi yang diberikan seperti sosialisasi, penyuluhan atau pelatihan sebagai literasi mitigasi bencana tsunami yaitu ada yang luput dari fokus pemerintah terkait jalur evakuasi antara daerah Carita sampai Sumur dalam upaya penanggulangan bencana yang masih kurang. Dimana jalur evakuasi sebagai upaya penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan handal terhadap kerentanan bencana ini haruslah menjadi fokus utama pemerintah. Dengan harapan masyarakat sadar apabila terjadi tsunami dapat mengevakuasi mandiri, dapat bersiap melarikan diri ke daratan yang

lebih tinggi dan untuk sementara melarikan ke shelter tsunami atau tempat yang dijadikan evakuasi sementara.

Sebagai salah satu upaya BPBD mengurangi resiko bencana tsunami diungkapkan oleh Bapak Suwandi anggota dari Bidang Kesiapsiagaan yaitu dalam Pusat Data Informasi dan Lokasi (Pusdalops) bahwa sudah diajukannya jalur evakuasi dari Carita sampai Sumur membutuhkan 15.000 papan jalur evakuasi. Namun, dengan keterbatasan APBD maka hanya 152 papan jalur evakuasi saja yang disetujui.

Melalui penelitian mengenai "Perspektif Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Literasi Mitigasi Bencana Tsunami Untuk Membentuk Civic Knowledge", maka akan diketahui menyangkut bencana tsunami di wilayah Pesisir Desa Teluk Kecamatan Labuan bagaimana literasi mitigasi bencana sebagai upaya untuk mengurangi serta langkah yang perlu diambil dalam kesiapsiagaan atau penanganannya untuk pengetahuan warga negara.

Penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui kerentanan bencana tsunami di lokasi penelitian, namun juga terkait dengan nilai apa yang seharusnya diketahui sebagai masyarakat negara (Civic Knowledge) dalam upaya agar mengetahui seberapa besar pengetahuan masyarakat setelah terlaksananya kesiapsiagaan atau mitigasi bencana tsunami di wilayah Pesisir Desa Teluk Kecamatan Labuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan Kualitatif dengan metode Deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Wakil Kepala Desa Teluk Kecamatan Labuan, Wakil Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang dan Warga lingkungan sekitar di Desa Teluk Kecamatan Labuan. Teknik

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka dapat diketahui dalam upaya mengetahui Pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami di Pesisir Desa Teluk, Peran aparatur Desa Teluk sebagai masyarakat lokal dan pemangku kebijakan dalam literasi mitigasi bencana tsunami di Pesisir Desa Teluk, Dampak dari literasi mitigasi bencana tsunami yang telah terlaksana di Pesisir Desa Teluk Kecamatan Labuan, dan Peran Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang atau fokus pemerintah terkait jalur evakuasi dalam upaya penanggulangan bencana yang masih kurang di Kecamatan Carita.

1. Pemahaman masyarakat terhadap literasi mitigasi bencana untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami di Pesisir Desa Teluk.

Pada hasil yang pertama, peneliti berdasarkan dari latar belakang masalah menanyakan terkait pemahaman masyarakat terhadap literasi mitigasi bencana untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami di Pesisir Desa Teluk. Hal ini sesuai dengan teori menurut Barton dan Hamilton dalam buku Dewayani dan Retnaningdyah (2017: 11-12), memetakan hubungan antara peristiwa literasi dan praktik literasi. Dalam bahasa sederhana, praktik literasi adalah apapun yang dilakukan orang dengan literasi. Praktik

literasi lebih abstrak, karena melibatkan nilai, sikap, perasaan, dan hubungan sosial, sedangkan peristiwa literasi merupakan komponen dari praktik sosial tersebut yang bisa dilihat dan diamati. Hal ini sama terkait literasi menurut Barton dan Hamilton dalam buku Dewayani dan Retnaningdyah (2017: 11-12), memberikan beberapa konsep penting untuk memahami literasi sebagai praktik sosial.

- a. Literasi dimaknai sebagai serangkaian praktik sosial, yang bisa dirunut dari berbagai peristiwa yang melibatkan teks tertulis
- b. Terdapat jenis-jenis literasi yang berbeda dalam aspek kehidupan yang berbeda pula
- c. Praktik literasi dibentuk oleh institusi sosial dan relasi kekuasaan. Sebagian literasi dianggap lebih dominan dan berpengaruh dibandingkan literasi yang lain.
- d. Praktik literasi memiliki tujuan tertentu dan terkait erat dengan tujuan sosial dan praktik budaya secara umum.
- e. Literasi terjadi dalam konteks sejarah.
- f. Praktik literasi selalu berubah, dan bentuk literasi baru seringkali diperoleh melalui proses pembelajaran dan pembentukan makna (meaning making) yang informal.

Demikian merujuk dari ulasan di atas mengkaji literasi sebagai praktik sosial, dalam sebuah situasi sosial kita dapat lihat bagaimana aktivitas literasi itu berperan. Seperti, literasi oleh karena kelompok sosial tertentu dapat dianggap sebagai bentuk kekuasaan atau ancaman. Sebagaimana literasi juga dapat berfungsi sebagai sarana terapi jiwa, menambah gengsi sosial, dan banyak fungsi lainnya.

Dalam penelitian ini aparatur Desa Teluk sebagai BPD yang bergerak di lingkungan sekitar, memiliki peranan penting dalam struktur sosial khususnya di lingkungan masyarakat sekitar dalam

upaya mengurangi resiko akibat bencana tsunami yang disebut mitigasi bencana. Mitigasi bencana secara istilah di mengerti sebagai upaya untuk mencegah, pengurangan resiko bencana atas dampak yang ditimbulkan dengan tujuan yang berdasarkan informasi akibat suatu bencana agar tepat meminimalisir jumlah korban dan kerusakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Galieh (2018: 1) UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (pelatihan, gladi, penyiapan sarana dan prasarana, SDM, logistik, dan pembiayaan). Dengan kesiapsiagaan yang tepat diharapkan upaya penanggulangan dapat lebih cepat dan tepat sehingga dapat meminimalisir jumlah korban dan kerusakan.

Peran pemerintah dalam mempengaruhi pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami sebagai upaya untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami sangatlah penting, namun peran aktif masyarakat tidak kalah menjadi komponen penting sebagai penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana dijelaskan sejalan dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari implementasi good and clean governance. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan lembaga pemerintah pada akhirnya akan melahirkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN (Ubaedillah & Rozak, 2017: 204). Hal ini berkaitan dengan pilar-pilar Good Governance pada tahap ini yang melibatkan kepentingan publik,

berdasarkan dengan pilar-pilar Good Governance sebagaimana termasuk di dalamnya lembaga yang menopang kepentingan publik yaitu sebagai berikut ini.

- Negara
 - a) Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil
 - b) Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
 - c) Menyediakan public service yang efektif dan accountable
 - d) Menegakan HAM
 - e) Melindungi lingkungan hidup
 - f) Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

- Sektor Swasta
 - a) Menjalankan industry
 - b) Menciptakan lapangan kerja
 - c) Menyediakan insentif bagi karyawan
 - d) Meningkatkan standar hidup masyarakat
 - e) Memelihara lingkungan hidup
 - f) Menaati peraturan
 - g) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
 - h) Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

- Masyarakat Madani
 - a) Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
 - b) Memengaruhi kebijakan publik
 - c) Sebagai sarana checks and balances pemerintah
 - d) Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
 - e) Mengembangkan SDM
 - f) Sarana berkomunikasi antaranggota masyarakat

Pembahasan

Adapun dalam hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membangun kewaspadaan terkait literasi mitigasi

bencana untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami di lingkungan sekitar Desa Teluk dalam upayanya oleh aparatur Desa Teluk dibantu bersama kemitraan yang baik dengan BPBD Pandeglang, BNPB Pusat, bahkan WHO serta komunitas dan relawan-relawan lainnya yaitu membangun kewaspadaan dan pencegahan serta kesiapsiagaan dengan mengadakan sosialisasi atau simulasi. Dimana yang ditanamkan oleh pemerintahan yaitu yang seharusnya memberikan yang sebagaimana dengan baik dapat menyampaikan yang menjadi hak masyarakat, hal utama kepercayaan atau keyakinan, baru kemudian pemahaman, dimana paham akan dengan istilah pemetaan wilayah sekitar Desa Teluk.

Hak atas informasi karena daerahnya dikelilingi oleh laut yang biasa terjadi tsunami, pasang gelombang tinggi, pasang rab airnya dan angin kencang, untuk masyarakat kemudian sadar bahwasanya tinggal di area zona merah, yang mana beresiko bencana tsunami sangat tinggi. Hak untuk menyampaikan usulan, dan hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kemudian aparatur dapat menerima kritik yang disampaikan oleh masyarakat yang nantinya diteruskan sehingga dapat tersampaikan melalui lembaga-lembaga perwakilan, pers maupun dilakukan secara langsung lewat dialog-dialog terbuka dengan jajaran birokrasi bersama LSM, partai politik, maupun organisasi sosial lainnya. Sebagaimana sesuai dengan tugas BPD yang tercantum dalam tupoksi, kewajiban, dan hak wewenang BPD Desa Teluk sebagai berikut:

- 1) Menggali aspirasi masyarakat
- 2) Menampung aspirasi masyarakat
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan Musyawarah BPD
- 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa

- 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada bulan Agustus 2020 hingga September 2020 di Desa Teluk, dalam upaya menelusuri perspektif masyarakat terhadap pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami untuk membentuk Civic Knowledge di lingkungan sekitar dari terlaksananya literasi mitigasi bencana tsunami di lingkungan sekitar aparatur Desa Teluk melakukan upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami. Upaya mitigasi bencana tsunami yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, terkait dengan pembangunan fisik serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana (Anies, 2017: 174).

Hal tersebut sesuai dengan temuan pada penelitian, dimana hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dengan Menelusuri terlaksananya literasi mitigasi bencana tsunami di lingkungan sekitar, Menulis berbagai pemahaman yang membangun kesadaran masyarakat di lingkungan sekitar, Melayani dalam hal pembantuan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami, Melakukan advokasi dan lobi, Rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pemulihan, Mengamati kebijakan literasi mitigasi dan perundang-undangan perihal penanggulangan bencana tsunami, dan Tempat pendidikan, pengenalan, menyebarluaskan informasi tentang hak

warga negara dan mengamati pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami.

Pentingnya Civic Knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan bagi masyarakat sebagai warga negara, yang dimana agar mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, tidak hanya pemenuhan hak dan kewajibannya untuk kondisi sosial yang stabil serta mengurus standar keselamatan publik yang baik saja namun tanggungjawabnya juga harus dilaksanakan.

Mengembangkan kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami oleh aparat Desa Teluk bersama BPBD Pandeglang, BNPB Pusat serta relawan-relawan dan komunitas lainnya bukan persoalan yang mudah sebagai peran yang seharusnya dapat bekerjasama dengan lingkungan masyarakat sekitar, dimana berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan bahwasanya dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan, memotivasi masyarakat, pada saat kegiatan berlangsung hingga kesuksesan kegiatan yang kemudian dapatkan kebermanfaatannya yang masyarakat peroleh, menjadikan meningkatnya pemahaman terkait kesiapsiagaan bencana di lingkungan masyarakat sekitar terutama perihal mitigasi bencana tsunami berkaitan penerapan prinsip, pengetahuan warga negara ataupun wawasan umum lainnya yang dapat berpengaruh pada meningkatnya pemahaman sebagai Civic Knowledge di lingkungan masyarakat sekitar.

Sebagaimana dijelaskan bahwasanya, di Indonesia hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak dan

kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap masyarakatnya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban masyarakat negara diberbagai bidang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar.

Demikian aparat Desa Teluk merupakan BPD di daerahnya bersama BPBD Pandeglang, dan BNPB Pusat sebagai lembaga dari pemerintah dalam pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami seharusnya dapat menyampaikan yang menjadi sebagai standar kebenaran, mengupayakan untuk merubah pengetahuan masyarakat. Informasi ataupun pengetahuan yang disampaikan tentunya berdasarkan dari perilaku yang benar dengan cara yang benar bukan untuk sebaliknya melakukan hal yang benar dengan cara yang salah. Namun sangat disayangkan dalam kenyataannya pemahaman masyarakat yang kurang tanggap masih banyak di lingkungan sekitar, seperti oleh karena hilang motivasi untuk mengikuti arahan atau kegiatan yang dilaksanakan, sehingga merusak yang telah menjadi upaya dalam mengurangi resiko akibat bencana tsunami oleh aparat Desa Teluk bersama lembaga lainnya yang sudah memiliki kerjasama yang baik, tentunya upaya yang dilakukan untuk merubah pengetahuan masyarakat karena ketika pengetahuan masyarakat itu berubah maka kondisi yang menjadi masalah itu akan berubah dengan sendirinya berdasarkan perilaku yang dilandasi dengan pengetahuan masyarakat serta motivasi untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami sebagai bentuk kewaspadaan untuk mencapai tujuan bersama, dimana Desa Teluk yang merupakan daerah rawan bencana tsunami yang sangat tinggi.

2. Peran aparat Desa Teluk sebagai masyarakat lokal dan pemangku

kebijakan dalam literasi mitigasi bencana tsunami di Pesisir Desa Teluk

Peran pemerintah dalam menyusun, melaksanakan kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami di Desa Teluk untuk mempengaruhi yang berkaitan dengan pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami sebagai upaya untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami sangatlah penting sebagai penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kebaikan bersama. Selain itu, berkaitan dengan beberapa upaya oleh aparatur Desa Teluk untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami di Pesisir Desa Teluk, yaitu peran aparatur Desa Teluk sebagai masyarakat dalam pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami berperan sebagai pelaku atau aktor yang memberikan informasi serta mendiskusikan dan meluruskan perihal pemahaman atau penafsiran jika ada yang kurang sesuai di masyarakat. Dan peran aparatur Desa Teluk sebagai pemangku kebijakan dalam pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami berperan sebagai fasilitator untuk masyarakat dalam keberhasilan terlaksananya kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami di lingkungan sekitar Desa Teluk. Sebagaimana dijelaskan dengan berdayanya suatu daerah hanya dapat terorganisir oleh pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri yaitu oleh pemerintahan daerahnya sendiri. Dimana hal ini berkaitan dengan otonomi daerah di suatu daerah.

Pemerintahan berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dan lain-lainnya. Selain itu juga mempunyai fungsi distributif akan hal-hal yang telah diungkapkan; fungsi regulatif baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa ataupun yang berhubungan dengan

kompetensi dalam rangka penyediaan tersebut; dan fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktivitas penyelenggaraan Negara. Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, menjaga keutuhan Negara-bangsa, serta mempertahankan diri dari kemungkinan serangan dari Negara lain, merupakan tugas pemerintahan yang bersifat universal.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sisman & Rauf (2016: 71) negara sebagai suatu entitas adalah abstrak. Yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak, dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

Pemahaman yang baik mengenai hubungan antara warga negara dengan negara sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif dan demokratis. Pada akhirnya pola hubungan yang baik antara warga negara dapat mendukung kelangsungan hidup bernegara. Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap masyarakatnya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban masyarakat negara diberbagai bidang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar.

Demikian dapat disimpulkan dari ulasan di atas bahwasanya dalam hubungan antara warga negara dan negara atau sebaliknya terdapat hak dan kewajiban masing-masing di dalamnya, dimana hukum yang mengatur. Dalam artian segala ketentuan hak dan kewajiban sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 terlebih dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang mendasar.

Adapun dalam hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam membangun kewaspadaan terkait literasi mitigasi untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami di lingkungan sekitar Desa Teluk dalam upayanya oleh aparatur Desa Teluk dibantu bersama kemitraan yang baik dengan BPBD Pandeglang, BNPB Pusat, bahkan WHO serta komunitas dan relawan-relawan lainnya yaitu membangun kewaspadaan dan pencegahan serta kesiapsiagaan dengan mengadakan sosialisasi atau simulasi. Dimana dalam membangun kesadaran melalui literasi mitigasi untuk mengurangi dampak bencana tsunami di lingkungan sekitar Desa Teluk, dengan upaya sosialisasi yang dilaksanakan aparatur Desa Teluk yang dapat menjaga kemitraan sehingga agenda yang berdasarkan arahan dan pelatihan dari BPBD Pandeglang, BNPB Pusat, bahkan WHO serta komunitas dan relawan-relawan lainnya dan dapat membangun kewaspadaan di lingkungan masyarakat sekitar karena itu tujuan dan harapan untuk kebaikan bersama.

Kemudian hal utama dalam sosialisasi yang dilaksanakan di masyarakat berupa kegiatan penyuluhan, sosialisasi, maupun simulasi dengan target seluruh masyarakat, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa yaitu pelaksanaan penyampaian informasi pada masyarakat di lingkungan sekitar Desa

Teluk yang sering kali dilaksanakan dengan titik kumpul di Kantor Desa Teluk. Dan untuk pelaksanaan di sekolah yaitu dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di lingkungan Labuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada bulan Agustus 2020 hingga September 2020 di Desa Teluk, dalam upaya mengetahui perspektif masyarakat terhadap pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami untuk membentuk Civic Knowledge di lingkungan sekitar. Kemudian untuk mengetahui peran kantor Desa Teluk sebagai masyarakat lokal dan pemangku kebijakan dalam literasi mitigasi bencana tsunami di Pesisir Desa Teluk. Sebagaimana upaya aparatur Desa Teluk dengan perannya dalam mitigasi bencana tsunami yang dimaksud dijelaskan oleh Sisman & Rauf (2016: 71-73), istilah Kewarganegaraan (Citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga. Dan negara menurut memori penjelasan dari Pasal II peraturan penutup Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Dimana berkaitan dengan wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan (role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif (Cholisin dalam bukunya Sisman & Rauf, 2016: 85).

Hal tersebut sesuai dengan temuan pada penelitian, dimana aparatur Desa memiliki peranan yang penting sebagai wakil negara untuk mengkoordinasi dan mengedukasi dengan cara Sosialisasi di

sekolah dan masyarakat mengenai mitigasi bencana tsunami, sehingga terciptanya pola antara masyarakat dan pemerintah bersama-sama siap untuk menghadapi bencana alam jika sewaktu-waktu terjadi. Hal tersebut sesuai dengan temuan pada penelitian ini atas rumusan masalah, dimana hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dengan terlaksananya Sosialisasi di sekolah dan masyarakat, serta aparatur Desa Teluk Berkoordinasi antar lembaga yang diantaranya bersama kabupaten atau kota dan bersama provinsi.

Mengembangkan kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami oleh aparatur Desa Teluk bersama BPBD Pandeglang, BNPB Pusat serta relawan-relawan dan komunitas lainnya bukan persoalan yang mudah sebagai peran yang seharusnya dapat mengelola kehidupan sosial, dimana berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, ekonomi, politik dan lain sebagainya dalam dimensi kehidupan serta memberikan pelayanan dan perlindungan pada masyarakat, menjaga keutuhan Negara-Bangsa, dan mempertahankan diri dari kemungkinan serangan Negara lain. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ubaedillah & Rozak (2017: 205) penguatan partisipasi masyarakat Madani (civil society) peningkatan partisipasi masyarakat adalah unsur penting lainnya dalam merealisasikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik mutlak dilakukan dan difasilitasi oleh Negara (Pemerintah).

Demikian peran aparatur Desa Teluk merupakan BPD di daerahnya bersama BPBD Pandeglang, dan BNPB Pusat sebagai lembaga dari pemerintah dalam pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami dengan upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami yang menjadi prioritas di Desa Teluk dikarenakan daerah yang

termasuk rawan bencana tsunami sangat tinggi. Dan oleh karena masyarakat mempunyai hak atas informasi, hak untuk menyampaikan usulan, dan hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Dimana peran serta masyarakat dalam proses kebijakan publik pada dasarnya dijamin oleh prinsip-prinsip HAM. Melalui lembaga-lembaga perwakilan, pers maupun dilakukan secara langsung lewat dialog-dialog terbuka dengan jajaran birokrasi bersama LSM, partai politik, maupun organisasi sosial lainnya kritik dapat dilakukan bahwasanya partisipasi masyarakat difasilitasi, selain itu juga termasuk dalam kewenangan BPD yaitu dimana BPD bewenang mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan, dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Dampak literasi mitigasi bencana tsunami yang telah terlaksana di Pesisir Desa Teluk Kecamatan Labuan

Dalam hal pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami oleh peran pemerintah sekitar atau daerah serta pemerintah pusat berdasarkan dari latar belakang masalah untuk mengetahui terkait dampak literasi mitigasi bencana tsunami yang telah terlaksana untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami di Pesisir Desa Teluk. Hal ini oleh karena penyebab yang sesuai seperti teori yang dikemukakan Anies (2017: 82-83) dampak tsunami ini sungguh luar biasa sehingga meninggalkan trauma bagi masyarakat yang tinggal di wilayah bekas tsunami. Seperti kita ketahui, gelombang tsunami yang naik ke daratan akan menyapu apa saja yang dilalui. Besarnya tekanan yang dibawa mampu menekan, menerjang, dan merusak berbagai ekosistem di lautan. Dampak yang ditinggalkan kurang lebih

sama seperti bencana alam lainnya. Oleh karena penyebab bencana tsunami murni alam, langkah pencegahan yang dapat dilakukan hanyalah dengan mempersiapkan masyarakat agar lebih waspada dan siaga. Untuk mendukung program ini, pemerintah menggerakkan semua pemangku kebijakan di segala sektor. Indonesia jauh tertinggal dari Jepang dalam menghadapi tsunami. Karena itu, dampak tsunami di Indonesia jauh lebih dramatis. Namun, hal tersebut disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah perbedaan kondisi perekonomian kedua Negara.

Selain membuat rencana yang berhubungan dengan segala persiapan dalam hal pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami yang menjadi prioritas di daerah yang rawan bencana tsunami sangat tinggi, aparatur Desa Teluk juga berperan sebagai wadah dalam pengembangan potensi masyarakat sekitar dan merupakan BPD yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial di lingkungan sekitar. Maka dari itu tidaklah mudah bagi aparatur Desa Teluk bersama BPBD Pandeglang, maupun BNPB Pusat untuk berpartisipasi aktif dalam hal pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami dengan kesuksesan oleh keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di lingkungan sekitar dengan penuh termotivasi dan mengikuti segala rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan penelitian maka peneliti melakukan catatan lapangan, berupa proses wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai berikut:

- a. Keikutsertaan BPBD Pandeglang dan Upaya mengurangi resiko bencana tsunami

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman serta pengetahuan pada

masyarakat. Bersama kemitraan yang baik dengan BPBD Pandeglang, BNPB Pusat, relawan dan komunitas lainnya berupaya dalam pengembangan strategi atas kegiatan Literasi Mitigasi Bencana Tsunami di lingkungan sekitar Desa Teluk selalu diutamakan untuk membuat antusias masyarakat lebih aktif dan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya yang bertujuan untuk membentuk Civic Knowledge yaitu berupa pembekalan, pelatihan, pembinaan serta pengembangan strategi dan inovasi secara lokal pada masyarakat di lingkungan sekitar dan membangun kemitraan dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Syafrezani (2010: 47-55) upaya-upaya mengurangi bencana tsunami sebagai berikut:

- a) Memahami prinsip-prinsip menyelamatkan diri dari Tsunami
- b) Melakukan evakuasi dan menempatkan korban-korban yang selamat di tenda-tenda pengungsian
- c) Menyediakan pelayanan kesehatan dan bantuan lainnya\
- d) Memberikan penyuluhan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit di kamp pengungsian
- e) Mengadakan pendidikan darurat pasca Tsunami

Demikian dalam pelaksanaan kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami di Desa Teluk oleh aparatur Desa Teluk dengan tujuannya memberi pemahaman serta pengetahuan pada masyarakat lingkungan sekitar Desa Teluk dalam bentuk literasi mitigasi bencana tsunami untuk membentuk Civic Knowledge yang lebih dipersiapkan kembali sebagai upaya dari kegiatan yang positif, namun didapati hasil setelah dilaksanakan kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami di lingkungan sekitar sangat disayangkan, dimana pemahaman masyarakat yang kurang tanggap masih banyak di lingkungan

sekitar, seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan dengan melihat sikap dan bagaimana masyarakat sekitar berpikir, dimana bentuk pengetahuan yang sekedar diketahui tentu bukan berarti masyarakat dapat memahami ataupun secara mendalam betul dalam kemampuan untuk mengenal dan memahami atau mengetahui sesuatu dalam mempelajari pengetahuan perihal literasi mitigasi bencana tsunami bukan hal yang mudah sepertinya.

Disebabkan oleh tingkat kemampuan masyarakat dalam mampu memahami arti atau konsep sekalipun masyarakat aktif ikut setiap pelaksanaan dan kurang mengikuti kegiatan yang terlaksana karena hilang motivasi untuk mengikuti arahan atau kegiatan yang dilaksanakan, sehingga mengurangi hasil maksimal yang diharapkan sebagai upaya dalam mengurangi resiko akibat bencana tsunami oleh aparatur Desa Teluk bersama lembaga lainnya yang sudah memiliki kerjasama yang baik. Seharusnya pengembangan strategi terkait pelaksanaan-pelaksanaan untuk tujuan yang menjadi cita-cita dapat terwujud serta dapat menciptakan kerjasama dengan masyarakat di lingkungan sekitar dengan baik, dimana banyak masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan, serta masyarakat memiliki pemahaman dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami di lingkungan sekitar secara mendalam, karena di dalamnya sudah terdapat upaya yang sangat baik dengan meluasnya relasi oleh aparatur Desa Teluk yang bertujuan menambah koordinasi agar pengembangan strategi terkait pelaksanaan-pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami maupun kesiapsiagaan bencana lainnya terlaksana baik dan penyampaian pendapat kepada pihak berwenang berupa penilaian dapat terorganisir dengan baik di lingkungan masyarakat sekitar. Sebagaimana yang

tercantum dalam ulasan di atas sebagai upaya-upaya untuk mengurangi resiko bencana tsunami tersebut aparatur Desa Teluk dengan berkoordinasi terkait bantuan dari pengembangan, pembekalan dan arahan untuk strategi dan inovasi dengan pendampingan oleh BPBD Pandeglang, BNPB Pusat, serta komunitas dan relawan-relawan lainnya sudah baik, tetapi hasil akhir dari setelah terlaksananya ada pada bagaimana masyarakat dapat mengolah informasi yang diperoleh dengan baik atau tidaknya.

b. Keikutsertaan Masyarakat dalam pelaksanaan Literasi Mitigasi Bencana Tsunami di lingkungan sekitar Desa Teluk

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman serta pengetahuan pada masyarakat di lingkungan sekitar dalam memberikan motivasi, pengembangan strategi atas kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami yang selalu diutamakan untuk membuat masyarakat lebih aktif dan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya dengan bertujuan untuk membentuk Civic Knowledge, yang dihadapi oleh aparatur Desa Teluk bersama BPBD Pandeglang, BNPB Pusat, serta relawan-relawan dan komunitas lainnya yaitu masih sedikit paham akan sadar pentingnya informasi dari literasi mitigasi bencana tsunami yang dilaksanakan di lingkungan sekitar Desa Teluk oleh karena terdapatnya masyarakat yang abai ataupun acuh, dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi serta kurangnya tingkat kemampuan masyarakat mendalam secara dalam dari informasi yang diperoleh. Adapun hal ini dijelaskan peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian

dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peranan negatif merupakan aktivitas masyarakat negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi (Sisman & Rauf, 2016: 85).

Peran aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik pada dasarnya dijamin oleh prinsip-prinsip HAM. Masyarakat mempunyai hak atas informasi, hak untuk menyampaikan usulan, dan hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kritik dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga perwakilan, pers maupun dilakukan secara langsung lewat dialog-dialog terbuka dengan jajaran birokrasi bersama LSM, partai politik, maupun organisasi sosial lainnya.

Berbagai upaya berupa informasi-informasi kebencanaan serta motivasi oleh aparat Desa Teluk dan BPBD Pandeglang dengan penuh diberikan sampai pada upaya pemasangan papan jalur evakuasi oleh BPBD Pandeglang di lingkungan masyarakat sekitar, namun sangat disayangkan pemahaman warga itu kurang tanggap oleh oknum warga yang mengambil bentuk tidak memeliharanya, yang tanpa disadari ketika nanti terjadi tsunami akan menjadi hilang arah dikarenakan panik duluan dan tidak ada penunjuk arah. Demikian hasil dari berbagai upaya bagaimana pun kembali pada kesadarannya masing-masing yaitu masyarakat sendiri.

Demikian dari hasil penelitian setelah terlaksananya kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami di lingkungan sekitar Desa Teluk dari upaya aparat Desa Teluk bersama BPBD Pandeglang, BNPB Pusat, serta relawan-relawan dan komunitas lainnya masih kurang memenuhi pencapaian yang menjadi

tujuan sebagaimana mestinya, dimana masih kurangnya pemahaman dari pengetahuan masyarakat yang diketahui secara mendalam, yaitu bagaimana mampu memahami arti atau konsep situasi serta masalah atau fakta yang diketahui dan juga bahkan oleh oknum masyarakat yang telah abai begitu saja dengan kegiatan yang terlaksana karena hilang motivasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Di samping aparat Desa Teluk dan lembaga tersebut di atas lainnya selalu memotivasi masyarakat sekitar, memberi bimbingan, arahan, pengetahuan atau pengertian bagaimana caranya mereka sadar dan tahu akan pentingnya informasi mitigasi bencana tsunami yang jika diterima dan dikelola informasi tersebut dengan baik menghasilkan meningkatnya pemahaman pengetahuan masyarakat dalam kesiapsiagaan kebencanaan, utamanya bencana tsunami karena menyadari daerahnya merupakan daerah yang rawan bencana tsunami sangat tinggi. Hal ini oleh karenanya Civic Knowledge atau pengetahuan Kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Civic Knowledge berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara (Winarno, 2013: 108).

4. Peran Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang atau fokus pemerintah terkait jalur evakuasi dalam upaya penanggulangan bencana yang masih kurang di Kecamatan Carita

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan visi dan misi setiap lembaga atau organisasi berdasarkan bidang-bidang dan divisi di dalamnya. Untuk menjalankan program kerja yang akan dilaksanakan. Peran pemerintah daerah atau BPBD Pandeglang dalam fokus pembuatan jalur evakuasi sebagai upaya penanggulangan

bencana yang masih kurang di Kecamatan Carita, dimana untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami yang termasuk dalam pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami dengan tujuan dan juga untuk kebaikan bersama. Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, terkait dengan pembangunan fisik serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Karena itu, mitigasi bencana adalah suatu upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Jadi, mitigasi bencana bersifat pencegahan sebelum kejadian (Anies, 2017: 174).

Dan sebagaimana literasi mitigasi bencana tsunami di lingkungan sekitar yang terlaksana secara terencana dengan strategi dan inovasi sesuai dengan keadaan alam atau secara lokal di lingkungan sekitarnya. Adapun beberapa program kerja aparatur BPD di berbagai daerah di Pandeglang, bersama BPBD Pandeglang dan BNPB Pusat bergerak cepat dalam penanggulangan bencana tsunami agar segera dapat menambah pengetahuan masyarakat di lingkungan sekitar, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Anies (2017: 79-81) berdasarkan Pedoman Mitigasi Bencana Alam Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Tahun 2009 Oleh Direktorat Pesisir Dan Lautan, Ditjen KP3K Kementerian Kelautan Dan Perikanan adalah sebagai berikut.

1) Upaya Mitigasi Bencana Tsunami Struktural

Upaya struktural dalam menangani masalah bencana tsunami adalah upaya teknis yang bertujuan untuk meredam energy gelombang tsunami yang menjalar ke kawasan pantai. Berdasarkan pemahaman atas mekanisme terjadinya tsunami, karakteristik gelombang tsunami, investarisasi, dan identifikasi kerusakan

struktur bangunan, upaya struktural tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut.

a. Alami, seperti penanaman hutan mangrove atau green belt, di sepanjang kawasan pantai dan perlindungan terumbu karang

b. Buatan, misalnya pembangunan breakwater, seawall, pemecah gelombang sejajar pantai untuk menahan tsunami. Memperkuat desain bangunan serta infrastruktur lainnya dengan kaidah teknik bangunan tahan bencana tsunami dan tata ruang akrab bencana, dengan mengembangkan beberapa insentif antara lain retrofitting dan relokasi.

2) Upaya Mitigasi Bencana Tsunami Nonstruktural

Upaya nonstruktural merupakan upaya nonteknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya mitigasi struktural maupun upaya lainnya. Upaya nonstruktural tersebut meliputi antara lain sebagai berikut.

a. Kebijakan tentang tata guna lahan, tata ruang, dan zonasi kawasan pantai yang aman bencana

b. Kebijakan tentang standarisasi bangunan (permukiman maupun bangunan lainnya) serta infrastruktur sarana dan prasarana

c. Mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala local

d. Pembuatan peta potensi bencana tsunami, peta tingkat kerentanan dan peta tingkat ketahanan sehingga dapat didesain kompleks permukiman "akrab bencana" yang memerhatikan berbagai aspek

e. Kebijakan tentang eksplorasi dan kegiatan perekonomian masyarakat kawasan pantai

f. Pelatihan dan simulasi mitigasi bencana tsunami

g. Penyuluhan dan sosialisasi upaya mitigasi bencana tsunami

h. Pengembangan sistem peringatan dini adanya bahaya tsunami.

Mengembangkan kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami dalam hal pelaksanaannya oleh karena adanya motivasi lebih yang diberikan untuk masyarakat sekitar baik secara langsung ataupun melalui media sosial serta berupa papan jalur evakuasi dan pengembangan sistem peringatan dini lainnya yang menjadi sebagai penganggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana tsunami. Demikian menanamkan pemahaman dengan pengembangan strategi dan inovasi dengan kearifan lokal di lingkungan masyarakat sekitar selalu diperbarui dalam upaya untuk meluruskan hal-hal yang bermanfaat dan pemahaman yang harus diketahui masyarakat sekitar agar tercapainya tujuan dari pelaksanaan kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami dengan telah dibuatkan rute evakuasi atau papan jalur evakuasi bila mana terjadi tsunami, namun hasilnya kembali lagi kepada kesadaran masyarakat lingkungan sekitarnya. Oleh karena dalam pelaksanaannya ada beberapa tahap kegiatan yang bertujuan untuk dampak yang positif dari peranan positif yaitu selain dari terlaksananya kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami berupa sosialisasi maupun simulasi tidak tertinggal terlaksana di sekolah-sekolah. Tetapi upaya untuk mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana tsunami dari memahami rute evakuasi atau papan jalur bila mana terjadi tsunami juga harus dipahami.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai Perspektif Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Literasi Mitigasi Bencana Tsunami Untuk Membentuk Civic Knowledge di Pesisir Desa Teluk, setelah melakukan tahap catatan lapangan, berupa

proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pengembangan kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami dalam meningkatkan pemahaman masyarakat di lingkungan sekitar Desa Teluk, sebagai upaya pengurangan resiko bencana yang harus dijalankan multi pihak dan untuk membangun kesadaran bersama, yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat sekitar Desa Teluk oleh aparatur Desa Teluk, bersama BPBD Pandeglang, BNPB Pusat serta komunitas dan relawan-relawan lainnya. Hasil dari upaya yang dilakukan untuk merubah pengetahuan masyarakat yaitu jika pengetahuan masyarakat berubah maka kondisinya akan berubah dengan sendirinya berdasarkan perilaku yang dilandasi dengan pengetahuan masyarakat, dapat memberdayakan manusia dan memampukannya menjadi sebuah tuntutan arus globalisasi untuk memenuhi tantangan di kemudian hari, serta memotivasi untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami yang tinggal di daerah rawan bencana tsunami sangat tinggi. Demikian berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa penyampaiannya terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana tsunami sangat berpengaruh terhadap meningkatkan pemahaman masyarakat dalam perspektif pengetahuan kewarganegaraan (Civic Knowledge).
2. Peran aparatur Desa Teluk sebagai masyarakat dalam pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami berperan sebagai pelaku atau aktor yang memberikan informasi serta mendiskusikan dan meluruskan perihal pemahaman atau penafsiran jika ada yang kurang sesuai di masyarakat. Dan peran aparatur Desa Teluk sebagai pemangku kebijakan dalam

pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami berperan sebagai fasilitator untuk masyarakat dalam keberhasilan terlaksananya kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami di lingkungan sekitar Desa Teluk. Sebagaimana tujuan dalam mewujudkan hubungan antara warga negara dengan negara yang berperan penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif dan demokratis dengan baik. Dimana aparaturnya Desa Teluk juga berperan dalam memberi pengaruh terkait kondisi sosial yang stabil serta mengurus standar keselamatan publik yang baik dari kompetensi dalam tatanan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang seharusnya diketahui sebagai pengetahuan kewarganegaraan (Civic Knowledge). Demikian peran aparaturnya Desa Teluk sebagai masyarakat lokal dan pemangku kebijakan dalam upaya literasi mitigasi bencana tsunami di lingkungan sekitar Desa Teluk, dan tak luput seharusnya terdapat banyak partisipasi masyarakat, bukan hanya beberapa saja. Namun keseluruhan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar yang harusnya ikut berpartisipasi, dimana merupakan tidak kalah sebagai komponen penting untuk mencapai keberhasilan dari tujuan bersama, selain dari upaya yang diberikan oleh aparaturnya Desa Teluk.

3. Dampak dalam kegiatan yang dilaksanakan aparaturnya Desa Teluk yaitu secara langsung dapat meluaskan relasi oleh aparaturnya Desa Teluk yang bertujuan menambah koordinasi agar pengembangan strategi terkait pelaksanaan-pelaksanaan berjalan semestinya sebagaimana yang diharapkan serta diikuti dengan penyampaian pendapat kepada pihak berwenang berupa penilaian dapat terorganisir dengan baik di lingkungan

masyarakat sekitar. Demikian aparaturnya Desa Teluk sebagai yang berperan penting dalam memotivasi masyarakatnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal penyampaian literasi mitigasi, kesiapsiagaan bencana tsunami dan masyarakat aktif berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat maupun menyampaikan penilaian kepada pihak berwenang. Ditunjukkan dengan dapat memberikan dampak baik atau efek positif, dikarenakan aparaturnya Desa Teluk berhasil dapat bekerjasama dengan masyarakat di lingkungan sekitar dengan baik sehingga dapat memberi pemahaman sebagai pengetahuan kewarganegaraan (Civic Knowledge) melalui pelaksanaan yang dipersiapkan, dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan pada masyarakat lingkungan sekitar Desa Teluk melalui kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami dalam kegiatan yang positif tersebut. Namun, pada kenyataannya ditemukan bahwa masih adanya masyarakat yang kurang tanggap oleh oknum masyarakat di lingkungan sekitar yang hilang motivasi untuk mengikuti arahan atau kegiatan yang dilaksanakan, serta merusak yang telah menjadi upaya untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami dalam mengembangkan kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami oleh aparaturnya Desa Teluk bersama BPBD Pandeglang, BNPB Pusat, serta komunitas dan relawan-relawan lainnya dengan masih terdapatnya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami yaitu oleh masyarakat yang abai ataupun acuh, dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi menjadi kurang berpartisipasi untuk mencapai keberhasilan dari efek positif yang akan didapatkan dari

dampak terlaksananya kegiatan tersebut di lingkungan masyarakat sekitar.

4. BPBD Pandeglang memiliki peran dalam fokus pembuatan jalur evakuasi sebagai upaya penanggulangan bencana tsunami di lingkungan sekitar untuk mengurangi resiko akibat bencana tsunami yang termasuk dalam pelaksanaan literasi mitigasi bencana tsunami dengan tujuan dan juga untuk memberdayakan manusia serta memampukannya untuk menghadapi bencana tsunami di kemudian hari. Melalui pembangunan fisik dalam meningkatkan kemampuan masyarakat, untuk menghadapi ancaman bencana tsunami dari memahami rute evakuasi atau papan jalur bila mana terjadi tsunami selain dari yang dipahami dari kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami berupa sosialisasi maupun simulasi. Demikian menanamkan pemahaman dengan pengembangan strategi dan inovasi sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan masyarakat sekitar selalu diperbarui dalam upaya untuk meluruskan hal-hal

yang bermanfaat dan pemahaman yang harus diketahui masyarakat sekitar agar tercapainya tujuan dari pelaksanaan kegiatan literasi mitigasi bencana tsunami dengan telah dibuatkan papan himbauan, rute evakuasi atau papan jalur evakuasi bila mana terjadi tsunami. Namun, hasilnya kembali lagi kepada kesadaran masyarakat lingkungan sekitarnya. Sebagaimana pada hasil penelitian ditemukan masih terdapatnya oknum masyarakat yang mengambil dan tidak memeliharanya, serta tidak mengindahkan papan himbauan, rute evakuasi ataupun papan jalur evakuasi sebagai bimbingan dan arahan dari BPBD Pandeglang oleh karena masyarakat yang abai ataupun acuh, dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Dimana jika papan himbauan yang menginformasikan daerah rawan bencana tsunami sangat tinggi khawatir mengakibatkan sedikit pengunjung dan berdampak pada lokasi wisata yang mereka jadikan sumber mata pencahaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, D Baehaqi, dan Aulia, S Syifa. 2016. Kewarganegaraan Digital, Penguatan Wawasan Global Masyarakat Negara, Dan Peran PPKN.
- Dewayani, Sofie & Retnaningdyah, Pratiwi. 2017. Suara Dari Marjin. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- F Miftah, Efi. 2018. Pengaruh Kegiatan Kepramukaan Terhadap Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jurnal Ilmiah Kependidikan, 9:2.
- Gunagama, Galieh. M, dkk. 2018. Buku Siap Siaga Bencana di Lingkungan Sekitar. Yogyakarta: Deepublish.
- Hilmi, Endang. 2012. Analisis Potensi Bencana Abrasi Dan Tsunami Di Pesisir Cilacap, Jurnal Penanggulangan Bencana, 3:1.
- Jokowinarno, Dwi. 2011. Mitigasi Bencana Tsunami Di Wilayah Pesisir Lampung, Jurnal Rekayasa, 15:1.
- M, Anies. 2017. Negara Sejuta Bencana. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nurgiansah, T. H. (2020). Filsafat Pendidikan. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. In *Solok: CV Mitra Cendekia Media*.

- Priyowidodo, Gatut, dan E Luik, Jandy. 2013. Literasi Mitigasi Bencana Tsunami Untuk Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Pacitan Jawa Timur, *Jurnal Ekotrans*, 13:1.
- Raharjo. 2017. Penguatan Civic Literacy Dalam Pembentukan Masyarakat Negara Yang Baik (Good Citizen) Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Masyarakat Negara Muda, *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23:2.
- Sisman, Wandhi Pratama P & Rauf, Ruslan. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Bingkai NKRI. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Sulaiman, Asep. 2015. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Bandung: Arfino Raya.
- Sulistyaningsih, Wiwik. 2012. Ketangguhan Mental Anak Dalam Menghadapi Bencana, *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 3:1.
- Syafrezani, Sampaguita. 2010. Tanggap Bencana Alam Tsunami. Bandung: Angkasa.
- Ubaedillah, A& Rozak, Abdul. 2017. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani. Jakarta : ICCE UIN Jakarta.
- Winarno. 2013. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.